POHON KINERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017

VISI PROVINSI JAWA BARAT → MISI PROVINSI JAWA BARAT → TUJUAN PROVINSI JAWA BARAT → SASARAN PROVINSI JAWA BARAT → INDIKATOR PROVINSI JAWA BARAT → VISI DISHUB PROV. JABAR → MISI DISHUB PROV. JABAR → TUJUAN DISHUB PROV. JABAR → SASARAN DISHUB PROV. JABAR → INDIKATOR DAN TARGET DISHUB PROV. JABAR → STRATEGI DISHUB PROV. JABAR → KEBIJAKAN DISHUB PROV. JABAR → PROGRAM DISHUB PROV. JABAR → KEGIATAN DISHUB PROV. JABAR → ANGGARAN DISHUB PROV. JABAR

VISI PEMPROV JABAR : JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA

- 1. MEMBANGUN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING
  - 1. MENINGKATKAN KUALITAS BIROKRASI YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SERTA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
- 2. MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG KOKOH DAN BERKEADILAN
  - 2. TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG MODERN
  - 3. TERWUJUDNYA PROFESIONALISME PEMERINTAHAN YANG DIDUKUNG OLEH APARATUR YANG KOMPETEN
  - 4. MENINGKATKAN STABILITAS DAERAH
- 3. MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN, PROFESIONALISME APARATUR DAN PERLUASAN PARTISIPASI PUBLIK
  - 1. MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKUNTABILITAS LAYANAN PEMERINTAHAN SERTA MEWUJUDKAN PERLUASAN PARTISIPASI PUBLIK
    - 1. SKALA KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PEMERINTAH
    - 2. JUMLAH PENERBITAN PERIJINAN
    - 3. PENDAPATAN ASLI DAERAH
    - 5. INDIKATOR DAYA SAING PROVINSI → VISI : TERWUJUDNYA SISTEM PERGERAKAN YANG HANDAL DAN EFESIEN
  - 2. MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS IPTEK;
  - 3. MENINGKATNYA PROFESIONALISME DAN KUALITAS KESEJAHTERAAN APARATUR
  - 4. MENINGKATNYA STABILITAS TIBUMTRANMAS, KESADARAN POLITIK DAN HUKUM
- 4. MEWUJUDKAN JAWA BARAT YANG NYAMAN DENGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG BERKELANJUTAN
  - 1. MENINGKATKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN
  - 2. MENINGKATKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENINGKAKAN PRODUKTIVITAS EKONOMI, DAN PELAYANAN DASAR
    - 1. MENINGKATNYA DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN SERTA KUALITAS PENANGANAN BENCANA
    - 2. MENINGKATNYA KUALITAS PEMENUHAN INFRASTRUKTUR DASAR MASYARAKAT
    - 3. MENINGKATNYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS
      - 1. PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
      - 2. TINGKAT KETERSEDIAAN FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN PROVINSI → VISI : TERWUJUDNYA SISTEM PERGERAKAN YANG HANDAL DAN EFESIEN
      - 3. TINGKAT KONDISI BAIK JARINGAN IRIGASI DI DAERAHIRIGASI KEWENANGAN PROVINSI
      - 4. RASIO ELEKTRIFIKASI RUMAH TANGGA
      - 5. CAKUPAN PELAYANAN PERSAMPAHAN PERKOTAAN
      - 6. CAKUPAN PELAYANAN AIR MINUM
      - 7. CAKUPAN PELAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK
- 5. MENGOKOHKAN KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN MELALUI PENINGKATAN PERAN PEMUDA, OLAH RAGA, SENI, BUDAYA DAN PARIWISATA KEARIFAN LOKAL

VISI DISHUB PROV. JABAR : 1. Meningkatkan Pelayanan Transportasi di Jawa Barat

1. Meningkatkan Pelayanan Transportasi di Jawa Barat

Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi → Meningkatnya kualitas pelayanan moda transportasi umum

- **1. Prosentase Jaringan Trayek AKDP yang terevaluasi di Jawa Barat** — Target : 35,14%
  - Strategi: Penataan jaringan trayek angkutan umum AKDP
  - Kebijakan: Penataan jaringan trayek angkutan umum
  - Program: Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
    - Kegiatan Evaluasi Angkutan Penumpang Umum AKDP di Jawa Barat — Rp 295,400,000
    - Kegiatan Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Analisa Dampak Lalin di Jawa Barat — Rp 200,000,000
- **2. Prosentase keikutsertaan kabupaten/kota dalam WTN** — Target : 66,66%
  - Strategi: Penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN) Kabupaten/Kota di Jawa Barat
  - Kebijakan: Penilaian wahana tata nugraha (WTN)
  - Program: Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
    - Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Teladan, Wahana Tata Nugraha dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat — Rp 402,550,000
    - Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Untuk Pemenang WTN Tahun 2016 — Rp 2,621,000,000
- **3. Prosentase kepemilikan armada angkutan umum AKDP perseorangan menjadi berbadan hukum** — Target : 75,05%
  - Strategi: Penataan Kelembagaan Angkutan Umum AKDP
  - Kebijakan: Penataan Kelembagaan Angkutan Umum
  - Program: Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
    - Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Manajemen dan Data Base Angkutan Umum Jawa Barat — Rp 397,800,000
    - Kegiatan Pembinaan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jawa Barat — Rp 370,650,000
    - Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Kendaraan Bermotor Terintegrasi di Jawa Barat — Rp 1,730,672,000
- **4. Prosentase ketersediaan terminal Type B yang memenuhi standar** — Target : 10%
  - Strategi: Standarisasi Terminal Tipe B di Jawa Barat
  - Kebijakan: Penataan Pengelolaan Terminal Tipe B di Jawa Barat
  - Program: Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
    - Kegiatan Operasional Pelayanan Angkutan Umum di Jawa Barat — Rp 2,663,550,000
    - Kegiatan Rehabilitasi Terminal Penumpang Umum Tipe B — Rp 6,434,400,000
    - Kegiatan Penyusunan DED Rehabilitasi Terminal Tipe B — Rp 596,760,000

Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan jalan → Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan umum

- **5. Prosentase Angkutan penumpang umum (AKDP) yang daftar ulang kartu pengawasan** — Target : 44%
  - Strategi: Pengawasan dan pengendalian AKDP melalui daftar ulang kartu pengawasan
  - Kebijakan: Peningkatan ketertiban lalu lintas angkutan umum AKDP
  - Program: Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
    - Kegiatan Penyelenggaraan lalu Lintas Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru — Rp 3,078,800,000
    - Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan di Jawa Barat — Rp 987,900,000

Meningkatkan penyediaan prasarana transportasi di Jawa Barat → Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi

- **6. Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (Penyusunan Dokumen Perencanaan BUB, Pembebasan Lahan BUB dan Pengembangan Bandara Nusawiru)** — Target : 49.41%
  - Strategi: Peningkatan Ketersediaan Prasarana Transportasi Udara
  - Kebijakan: Percepatan pembangunan dan peningkatan prasarana transportasi Udara
  - Program: Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
    - Kegiatan BUB Pembangunan Pagar BUB dikertajati (Lanjutan) — Rp 5,072,610,000
    - Kegiatan Pembuatan Sertifikat Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang dipakai Bandara Nusawiru — Rp 287,560,000
    - Kegiatan Pembangunan Gedung Display BUB di Kertajati (Lanjutan) — Rp 24,982,380,000
    - Kegiatan Pembuatan Sertifikat Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang dipakai BUB — Rp 291,260,000
    - Kegiatan Pembangunan Pagar Bandara Nusawiru (Lanjutan) — Rp 4,972,570,000
    - Kegiatan Pembangunan TaxyWay dan Appron (Lanjutan) di Bandara Nusawiru Kab. Pangandaran — Rp 2,484,310,000
    - Kegiatan Penyusunan Dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan BUB Kertajati — Rp 722,835,000
    - BUB- Multi Aksi Pihak Implementasi Pembangunan BUB di Jawa Barat — Rp 138,672,000
- **7. Prosentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut dan ASDP (Penyusunan Dokumen Perencanaan Laut dan ASDP, Pembebasan Lahan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Palabuhanratu, Pengembangan Laut dan ASDP)** — Target : 62.36%
  - Strategi: Peningkatan Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut dan ASDP
  - Kebijakan: Percepatan pembangunan dan peningkatan prasarana transportasi Laut dan ASDP
  - Program: Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
    - Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan dan ASDP di Jawa Barat — Rp 3,544,900,000
    - Kegiatan Penyusunan Dokumen Kerjasama Pembangunan Pelabuhan Laut di Jawa Barat (Bagian Utara dan Selatan) — Rp 126,870,000
    - Kegiatan Penyusunan DED Pembangunan Pelabuhan ASDP di Waduk Cirata — Rp 393,710,000
    - Kegiatan CLTH- Penyusunan AMDAL Pembangunan Dermaga Kapal Wisata (Teluk Palangpang) Kabupaten Sukabumi — Rp 717,870,000
    - Kegiatan CLTH-Penyusunan DED Pembangunan Dermaga Kapal Wisata (Teluk Palampang) Kabupaten Sukabumi — Rp 637,715,000
    - Kegiatan Penyusunan Dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Jawa Barat — Rp 443,040,000
    - Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran di Sungai dan Danau di Jawa Barat — Rp 632,750,000
    - Kegiatan Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) — Rp 653,600,000
    - Kegiatan Penyusunan Kajian Penyelenggaraan Kenavigasian Pelabuhan Pengumpan Regional di Teluk Palanggang Kabupaten Sukabumi — Rp 650,000,000
- **8.Prosentase penyediaan prasarana kereta api di Jawa Barat (dokumen perencanaan, pembebasan lahan, sosialisasi)** — Target : 91.3%
  - Strategi: Peningkatan Ketersediaan Prasarana Transportasi Kereta Api
  - Kebijakan: Percepatan pembangunan dan peningkatan prasarana transportasi Kereta Api
  - Program: Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
    - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perkeretaapian di Jawa Barat — Rp 371,450,000
    - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Keselamatan Perkeretaapian di Jawa Barat — Rp 754,100,000
    - Kegiatan Persiapan Perencanaan Penertiban Lahan Reaktivasi Kereta Api Rancaekek - Tanjungsari — Rp 377,150,000
    - Kegiatan Persiapan Pengadaan Lahan Kebutuhan Reaktivasi Kereta Api Rancaekek - Tanjungsari — Rp 975,400,000

Misi 2 : Meningkatkan Jalan yang Berkeselamatan di Jawa Barat

Meningkatkan ketersediaan perlengkapan jalan → 2. Meningkatnya ketersediaan perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi

- **9. Prosentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di jalan Provinsi** — Target : 21%
  - Strategi: Peningkatan ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi
  - Kebijakan: Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi
  - Program: Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
    - Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas di Balai Pengelolaan LLAJ Wilayah I — Rp 9,968,625,000
    - Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas di Balai Pengelolaan LLAJ Wilayah IV — Rp 8,000,000,000
    - Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas di Balai Pengelolaan LLAJ Wilayah II — Rp 5,681,450,000
    - Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas di Balai Pengelolaan LLAJ Wilayah III — Rp 5,700,000,000
    - Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas di Jawa Barat — Rp 1,980,000,000

CASCADING DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017

VISI PEMPROV JABAR : JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA

MISI KE-3 : MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN, PROFESIONALISME APARATUR DAN PERLUASAN PARTISIPASI PUBLIK

SASARAN KE- PADA MISI KE-3 PROV. JABAR : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik

INDIKATOR DAYA SAING PROVINSI

MISI KE-4 PROV. JABAR : MEWUJUDKAN JAWA BARAT YANG NYAMAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG BERKELANJUTAN

Sasaran ke3 pada Misi ke-4 PROV. JABAR : Meningkatnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur

INDIKATOR : PROSENTASE KETERSEDIAAN FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT

VISI : TERWUJUDNYA SISTEM PERGERAKAN YANG HANDAL DAN EFESIEN

MISI 1 : Meningkatkan Pelayanan Transportasi di Jawa Barat

TUJUAN 1: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI

Sasaran 1 - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Moda Transportasi Umum

1.1	Prosentase keikutsertaan kabupaten/kota dalam WTN
1.2	Prosentase kepemilikan armada angkutan umum AKDP perseorangan menjadi berbadan hukum
1.3	Prosentase Jaringan Trayek AKDP yang terevaluasi di Jawa Barat
1.4	Prosentase ketersediaan Terminal Tipe B yang memenuhi standar

KEPALA BIDANG TRANSPORTASI DARAT

1.1.1	Peningkatan keikutsertaan kabupaten/kota dalam WTN
1.1.2	Peningkatan kepemilikan armada angkutan umum AKDP perseorangan menjadi berbadan hukum
1.1.3	Peningkatan Jaringan Trayek AKDP yang terevaluasi di Jawa Barat
1.1.4	Peningkatan ketersediaan Terminal Tipe B yang memenuhi standar
4.1.1	Peningkatan ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
3.1.1	Peningkatan Angkutan penumpang umum (AKDP) yang daftar ulang Kartu Pengawasan

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

4.1.1.1	Jumlah ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan di ruas Jalan Provinsi

Kepala Seksi Angkutan Darat

1.1.3.1	Kajian Evaluasi angkutan penumpang umum AKDP di Jawa Barat
1.1.1.1	Jumlah Peserta Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Tahun 2016 di Jawa Barat
1.1.1.2	Jumlah Peserta Pelajar Pelopor Tahun 2016
1.1.1.3	Jumlah Kab/Kota di Jawa Barat yang mengikuti lomba tertib lalu lintas (Wahana Tata Nugraha)
1.1.2.1	Jumlah Angkutan Penumpang Umum AKDP perseorangan yang menjadi Badan Hukum Tahun 2016
3.1.1.1	Jumlah Angkutan penumpang umum (AKDP) yang daftar ulang Kartu Pengawasan

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan

0.0.0	Jumlah CCTV di Jawa Barat
1.1.4.1	Jumlah Terminal Tipe B di Jawa Barat yang sesuai standar
1.1.3.2	Kajian Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jawa Barat

KEPALA BALAI PENGELOLAAN LLAJ WILAYAH I

4.1.1	Peningkatan ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
1.1.4	Peningkatan ketersediaan Terminal Tipe B yang memenuhi standar

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

0.0.0	Persentase data asset yang valid
0.0.0	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu
0.0.0	Persentase layanan administrasi kantor tepat waktu sesuai SOP
0.0.0.0.	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor di UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta

KEPALA SEKSI OPERASI LLAJ

	Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor

KEPALA SEKSI FASILITAS LLAJ

0.0.0.0.	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor di UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta
4.1.1.1	Jumlah ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan di ruas Jalan Provinsi
	Sarana dan Prasarana kantor yang terpelihara

TUJUAN 2: MENINGKATNYA KETERTIBAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

Sasaran 2 - Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Umum

3.1	Prosentase Angkutan penumpang umum (AKDP) yang daftar ulang Kartu Pengawasan

KEPALA BIDANG PERKERETAAPIAN

3.2.1	Peningkatan penyediaan prasarana kereta api di Jawa Barat (dokumen perencanaan, pembebasan lahan, sosalisasi)

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian

0.0.0	Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

Kepala Seksi Sarana Prasarana Perkeretaapian

3.2.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan / persiapan terkait Reaktivasi Kereta Api Rancaekek - Tanjungsari

Kepala Seksi Keselamatan Perkeretaapian

3.2.1.2	Jumlah Dokumen Perencanaan / Kesepakatan/ lainnya terkait perkeretaapian di Jawa Barat

KEPALA BALAI PENGELOLAAN LLAJ WILAYAH II

4.1.1	Peningkatan ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
1.1.4	Peningkatan ketersediaan Terminal Tipe B yang memenuhi standar

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD LLAJ WILAYAH II CIREBON-PRIANGAN

0.0.0	Persentase data asset yang valid
0.0.0	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu
0.0.0	Persentase layanan administrasi kantor tepat waktu sesuai SOP
0.0.0.0.	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor di UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta

KEPALA SEKSI LALU LINTAS UPTD LLAJ WILAYAH II CIREBON-PRIANGAN

	Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor

KEPALA SEKSI ANGKUTAN UPTD LLAJ WILAYAH II CIREBON-PRIANGAN

0.0.0.0.	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor di UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta
4.1.1.1	Jumlah ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan di ruas Jalan Provinsi
	Sarana dan Prasarana kantor yang terpelihara

TUJUAN 3 : MENINGKATKAN PENYEDIAAN PRASARNA TRANSPORTASI DI JAWA BARAT

Sasaran 3 - Meningkatnya Ketersedian Prasarana Transportasi

3.1	Prosentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut dan ASDP (Penyusunan Dokumen Perencanaan Laut dan ASDP, Pembebasan Lahan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Palabuhanratu, Pengembangan Laut dan ASDP)
3.2	Prosentase penyediaan prasarana kereta api di Jawa Barat (dokumen perencanaan, pembebasan lahan, sosalisasi)
3.3	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (Penyusunan Dokumen Perencanaan BUB, Pembebasan Lahan BUB dan Pengembangan Bandara Nusawiru)

KEPALA BIDANG TRANSPORTASI LAUT DAN ASDP

3.1.1	Peningkatan Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut dan ASDP (Penyusunan Dokumen Perencanaan Laut dan ASDP, Pembebasan Lahan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Palabuhanratu, Pengembangan Laut dan ASDP)

Kepala Seksi Kepelabuhanan

3.1.1.1	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional Provinsi Jawa Barat
3.1.1.2	Jumlah Dokumen UKL/UPL

Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan ASDP

3.1.1.3	Jumlah dokumen perencanaan / kerjasama peningkatan ketersediaan prasarana laut dan ASDP

Kepala Seksi Perkapalan dan Kenavigasian

3.1.1.4	Jumlah kajian kenavigasian pelabuhan
3.1.1.5	Jumlah sarana dan prasarana keselamatan pelayaran di sungai dan danau

KEPALA BALAI PENGELOLAAN LLAJ WILAYAH III

4.1.1	Peningkatan ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
1.1.4	Peningkatan ketersediaan Terminal Tipe B yang memenuhi standar

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD LLAJ WILAYAH II CIREBON-PRIANGAN

0.0.0	Persentase data asset yang valid
0.0.0	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu
0.0.0	Persentase layanan administrasi kantor tepat waktu sesuai SOP
0.0.0.0.	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor di UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta

KEPALA SEKSI LALU LINTAS UPTD LLAJ WILAYAH II CIREBON-PRIANGAN

	Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor

KEPALA SEKSI ANGKUTAN UPTD LLAJ WILAYAH II CIREBON-PRIANGAN

0.0.0.0.	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor di UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta
4.1.1.1	Jumlah ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan di ruas Jalan Provinsi
	Sarana dan Prasarana kantor yang terpelihara

KEPALA BALAI PENGELOLAAN PELABUHAN LAUT

3.1.1	Peningkatan Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut dan ASDP (Penyusunan Dokumen Perencanaan Laut dan ASDP, Pembebasan Lahan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Palabuhanratu, Pengembangan Laut dan ASDP)

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

0.0.0	Persentase data asset yang valid
0.0.0	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu
0.0.0	Persentase layanan administrasi kantor tepat waktu sesuai SOP

KEPALA SEKSI OPERASI PELABUHAN LAUT

0.0.0.0.	Peningkatan Sarana dan Prasarana

KEPALA SEKSI FASILITAS PELABUHAN LAUT

0.0.0.0.	Sarana Prasarana yang terpelihara

KEPALA BALAI PENGELOLAAN ASDP

3.1.1	Peningkatan Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut dan ASDP (Penyusunan Dokumen Perencanaan Laut dan ASDP, Pembebasan Lahan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Palabuhanratu, Pengembangan Laut dan ASDP)

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

0.0.0	Persentase data asset yang valid
0.0.0	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu
0.0.0	Persentase layanan administrasi kantor tepat waktu sesuai SOP

KEPALA SEKSI OPERASI ASDP

0.0.0.0.	Peningkatan Sarana dan Prasarana

KEPALA SEKSI FASILITAS ASDP

0.0.0.0.	Sarana Prasarana yang terpelihara

Misi 2 : Meningkatkan Jalan yang Berkeselamatan di Jawa Barat

Tujuan 4 : Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Jalan

Sasaran 4 - Meningkatnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi

4.1	Prosentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di jalan Provinsi

KEPALA BIDANG TRANSPORTASI UDARA

3.3.1	Peningkatan ketersediaan prasarana transportasi udara (Penyusunan Dokumen Perencanaan BUB, Pembebasan Lahan BUB dan Pengembangan Bandara Nusawiru)

Kepala Seksi Kebandaarudaraan

3.3.1.1	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan BUB Kertajati

Kepala Seksi Angkutan Udara

3.3.1.2	Kajian Multi Aksi Pihak Implementasi Pembangunan BUB di Jawa Barat

Kepala Seksi Keselamatan Penerbangan

3.3.1.3	Jumlah Dokumen Masterplan Bandar Udara

KEPALA BALAI PENGELOLAAN LLAJ WILAYAH IV

4.1.1	Peningkatan ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
1.1.4	Peningkatan ketersediaan Terminal Tipe B yang memenuhi standar

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD LLAJ WILAYAH II CIREBON-PRIANGAN

0.0.0	Persentase data asset yang valid
0.0.0	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu
0.0.0	Persentase layanan administrasi kantor tepat waktu sesuai SOP
0.0.0.0.	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor di UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta

KEPALA SEKSI LALU LINTAS UPTD LLAJ WILAYAH II CIREBON-PRIANGAN

	Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor

KEPALA SEKSI ANGKUTAN UPTD LLAJ WILAYAH II CIREBON-PRIANGAN

0.0.0.0.	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor di UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta
4.1.1.1	Jumlah ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan di ruas Jalan Provinsi
	Sarana dan Prasarana kantor yang terpelihara

KEPALA BALAI PENGELOLAAN BANDAR UDARA

3.3.1	Peningkatan ketersediaan prasarana transportasi udara (Penyusunan Dokumen Perencanaan BUB, Pembebasan Lahan BUB dan Pengembangan Bandara Nusawiru)

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

0.0.0	Persentase data asset yang valid
0.0.0	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu
0.0.0	Persentase layanan administrasi kantor tepat waktu sesuai SOP

KEPALA SEKSI OPERASI BANDAR UDARA

0	Persentase pengadaan sarana prasarana kantor di Balai Pengelolaan Bandar Udara
0	Penyediaan sarana dasar kantor
3.3.1.1	Peningkatan pelayanan bandar udara

KEPALA SEKSI FASILITAS BANDAR UDARA

0	Persentase sarana prasarana kantor yang terpelihara di Bandara Nusawiru
3.3.1.2.	Panjang pagar BUB yang dibangun Tahun 2017
3.3.1.3	Prosentase penyelesaian pembangunan gedung Display di Bandara Kertajati sampai dengan Tahun 2017
3.3.1.4	Jumlah Penerbitan sertifikat tanah di Bandara Nusawiru
3.3.1.5	Jumlah Penerbitan sertifikat tanah di BUB
3.3.1.6	Panjang pagar Bandara Nusawiru yang dibangun Tahun 2017
3.3.1.7	Pembangunan Taxiway dan Appron di Bandara Nusawiru

SEKRETARIS

1.1	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas (%)
1.2	Presentase Laporan Capaian Kinerja Keuangan Tepat Waktu dan data aset (laporan)
1.3	Presentase Data Kepegawaian yang Akurat (dokumen)

KASUBAG KEUANGAN DAN ASET

1.2.1	Persentase Terselesaikannya Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu
1.2.2	Prosentase Penyelesaian Pencairan Tepat Waktu
1.2.3	Persentase data asset yang valid

KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM

1.1.1	Jumlah Pegawai Yang mengikuti Diklat / Peningkatan Kemampuan Aparatur Lainnya
1.1.2	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu
1.1.3	Persentase layanan administrasi kantor tepat waktu sesuai SOP
1.1.4	Persentase sarana dan prasarana kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang terpelihara Tahun 2016
1.1.5	Pembangunan / rehabilitasi / pengadaan sarana dan prasarana kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN

1.3.1	Jumlah Kegiatan yang harus dilaporkan dan dimonitoring
1.3.2	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja Tepat Waktu
1.3.3	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu